



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 110/M.PPN/HK/12/2025
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TAHUN 2025-2029**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu disusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia;
- b. bahwa penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 disepakati dalam Berita Acara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Nomor 003/BA/SDI/06/2022 tentang Kesepakatan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat Program yang terdiri atas:
- a. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - b. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. Peningkatan Kepatuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. Optimalisasi Sistem Katalog Data Nasional;
 - e. Optimalisasi dan Pengembangan Portal Data;
 - f. Pengembangan Teknologi Terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara dan Penguatan Literasi Satu Data Indonesia;
 - h. Penguatan Keberlanjutan Satu Data Indonesia.
- KETIGA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyelenggaraanya, dilakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara berkala untuk dilaporkan kepada Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi capaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dengan melibatkan Pembina Data dan Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

KEENAM ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2025

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 110/M.PPN/HK/12/2025
TANGGAL 24 DESEMBER 2025

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) periode 2025–2029 memegang peran krusial sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045. Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana Transformasi Digital dan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) menjadi pilar fundamental agenda pembangunan ekonomi dan sosial. SDI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan data administratif, melainkan bertransformasi menjadi *enabler* utama yang menjamin akurasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional.

Landasan hukum bagi perbaikan tata kelola data pemerintah ini telah ditegakkan secara kokoh melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Periode 2019-2024 merupakan masa monumental bagi Pemerintah Indonesia dalam meletakkan dan memperkuat fondasi SDI secara masif dan terstruktur. Capaian strategis yang telah diwujudkan dalam periode tersebut meliputi penguatan tata kelola melalui regulasi dan kelembagaan, inisiasi standardisasi data melalui penerapan prinsip SDI, serta penguatan infrastruktur Portal SDI. Keberhasilan capaian fondasi ini memosisikan SDI bukan lagi sekadar inisiatif, melainkan sebuah ekosistem data nasional yang fokus pada akselerasi pemanfaatan di tahun 2025-2029.

Pada periode pemerintahan 2024-2029, tuntutan terhadap akurasi dan kecepatan data menjadi semakin tinggi. Secara spesifik, Rencana Aksi ini dirancang untuk memberikan dukungan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi bagi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Nasional (PSN), program direktif Presiden, program prioritas daerah, dan program lainnya. Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, penuntasan TBC, hingga pembangunan 3 juta rumah memerlukan basis data yang valid, *real-time*, dan akuntabel untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas anggaran. Oleh karena itu, SDI menempatkan data PHTC, PSN, dan program direktif Presiden sebagai data prioritas yang harus dikelola melalui siklus data yang terstandardisasi.

Paradigma pengelolaan data pemerintah saat ini juga tengah mengalami pergeseran fundamental dari sekadar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (*Digital Government*). Perubahan ini menuntut transisi dari digitalisasi proses manual menuju pelayanan yang terintegrasi, proaktif, personal, dan berbasis data (*citizen & data-driven*). Dalam kerangka Pemerintah Digital, SDI berperan vital dalam menyediakan arsitektur data yang dapat dibagipakaikan secara nasional, menjamin keamanan siber, serta

menyiapkan infrastruktur teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan *big data* untuk menciptakan nilai tambah bagi publik.

Penyusunan Rencana Aksi 2025-2029 didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan renaksi periode sebelumnya yaitu tahun 2022-2024, guna memastikan keberlanjutan (*sustainability*) dan kesinambungan program. Evaluasi menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan penekanan lebih tajam, seperti ketimpangan kesadaran (*awareness*) antar instansi, isu keamanan siber, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola data, serta perlunya penyelesaian program *carry over* yang strategis. Tantangan ini memerlukan penguatan kolaborasi multi-pihak yang lebih intensif untuk mengatasi isu sektoral yang masih terjadi.

Guna menjawab secara komprehensif tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan agenda Presiden 2024-2029, Rencana Aksi SDI 2025-2029 distrukturkan ke dalam lima dimensi strategis yaitu:

1. Dimensi Tata Kelola;
2. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur;
3. Dimensi Siklus dan Kualitas Data;
4. Dimensi Kapasitas SDM; dan
5. Dimensi Keberlanjutan.

Pendekatan multidimensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap aspek penyelenggaraan data tertangani secara komprehensif dengan program yang jelas, dari penguatan regulasi dan kelembagaan, pengembangan portal dan platform integrasi data, hingga pembudayaan data (*data culture*) yang adaptif terhadap perkembangan teknologi global.

B. Maksud dan Tujuan

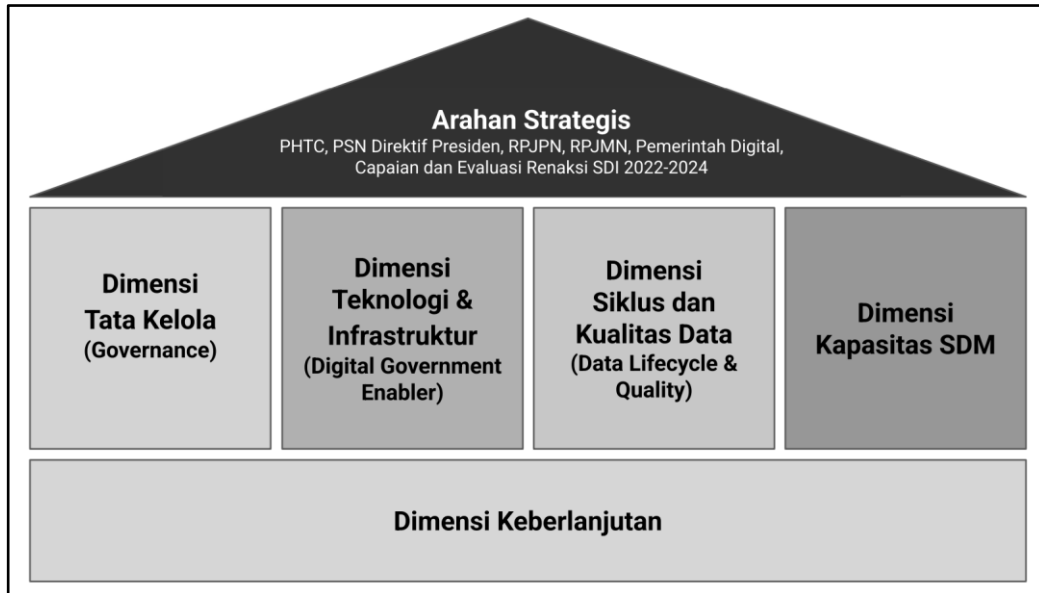
Maksud dan tujuan dari dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi arah dan landasan operasional yang kokoh bagi seluruh Penyelenggara SDI dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional, dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola data yang transparan, terstandarisasi, dan interoperabel antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
2. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah melalui ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengoptimalkan integrasi sistem data nasional;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan mengurangi duplikasi data;
5. Membangun ekosistem digital pemerintah yang inklusif dan adaptif, sejalan dengan transformasi digital dan reformasi birokrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 mencakup arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2025–2029 secara menyeluruh, yang diuraikan ke dalam lima dimensi strategis utama, dengan uraian sebagai berikut:

Gambar Dimensi Rencana Aksi SDI Tahun 2025-2029



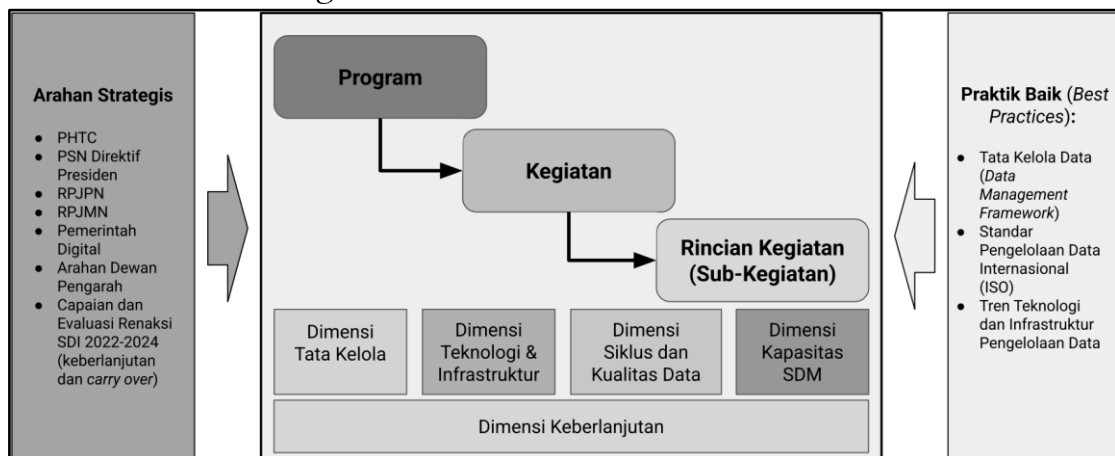
1. Dimensi Tata Kelola: mencakup penataan kerangka kerja mulai dari penguatan aspek kelembagaan, penyelarasan kebijakan dan regulasi yang bersifat akseleratif, hingga intensifikasi kolaborasi multi pihak untuk menjamin sinergi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam ekosistem SDI;
2. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur: berfungsi sebagai pilar digital yang memastikan ketersediaan platform integrasi data (*data integration platform*) yang andal, menjamin integrasi sistem data antar instansi secara *seamless* dan *real-time*, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan teknologi terkini untuk pengelolaan data sebagai nilai tambah publik, serta penguatan sistem *cybersecurity* untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data nasional;
3. Dimensi Siklus dan Kualitas Data: memastikan proses data berjalan presisi dari hulu ke hilir meliputi tahapan perencanaan, produksi dan akuisisi data, penguatan manajemen data dan standardisasi, penjaminan kualitas data yang akurat dan mutakhir, hingga pemanfaatan data secara optimal sebagai dasar kebijakan pembangunan;
4. Dimensi Kapasitas SDM: ditujukan untuk membangun kapabilitas SDM yang unggul, melalui program penyiapan SDM Data yang terencana, peningkatan kapasitas SDM Data secara berkelanjutan, serta intensifikasi literasi data di seluruh aparatur pemerintah; dan
5. Dimensi Keberlanjutan: menetapkan mekanisme pengukuran dampak strategis, yang meliputi dampak terhadap PHTC, PSN, program direktif Presiden, program prioritas daerah, dan program lainnya untuk capaian jangka menengah, analisis dampak, serta penetapan prosedur pemantauan

dan evaluasi implementasi Satu Data Indonesia, jaminan *sustainability* program, dan pengembangan budaya pengambilan keputusan berbasis data.

D. Kerangka Pemikiran

Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025–2029 didasarkan pada kerangka pemikiran yang menjamin linearitas kebijakan, kesinambungan program, dan akuntabilitas capaian, dengan fokus utama pada optimalisasi data untuk mendukung sasaran pembangunan nasional. Landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diintegrasikan secara vertikal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai payung strategis. Kerangka pemikiran ini memvisualisasikan SDI sebagai instrumen vital yang menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Gambar Kerangka Pemikiran Rencana Aksi SDI Tahun 2025-2029



Dalam konteks visualisasi, Rencana Aksi berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan mandat pembangunan di sisi kiri dengan panduan praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan data di sisi kanan. Secara metodologis, penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan Rencana Aksi merujuk pada lima dimensi sebagaimana dirinci dalam bagian ruang lingkup yaitu Dimensi Tata Kelola, Dimensi Teknologi & Infrastruktur, Dimensi Siklus dan Kualitas Data, Dimensi Kapasitas SDM, dan Dimensi Keberlanjutan. Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan dimensi ini bertujuan untuk memastikan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan tepat sasaran di seluruh aspek penyelenggaraan SDI. Keterpaduan ini menjamin bahwa setiap kegiatan berjalan selaras menuju target capaian nasional.

Rencana Aksi SDI Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 8 program utama yang merupakan intervensi kunci untuk akselerasi implementasi SDI dari upaya peletakan fondasi menuju fokus optimalisasi. Program utama dalam Rencana Aksi SDI tahun 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

2. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
3. Peningkatan Kepatuhan Prinsip Satu Data Indonesia;
4. Optimalisasi Sistem Katalog Data Nasional;
5. Optimalisasi dan Pengembangan Portal Data;
6. Pengembangan Teknologi Terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara dan Penguatan Literasi Satu Data Indonesia; dan
8. Penguatan Keberlanjutan Satu Data Indonesia.

Berdasarkan program utama yang telah ditetapkan, kemudian diturunkan menjadi 34 kegiatan dan 89 sub-kegiatan yang terukur target -capaiannya.

Pelaksanaan Rencana Aksi secara terpadu melalui dimensi dan program tersebut bertujuan menghasilkan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi. Data ini merupakan input krusial bagi terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintah digital yang efisien dan terpadu, sekaligus mendukung Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) yang tajam dan tepat sasaran. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan peran SDI dalam optimalisasi keberhasilan agenda pembangunan periode 2024-2029.

E. Sistematika Dokumen

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 disusun dalam empat bab dengan struktur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kerangka pemikiran, dan sistematika dokumen;
2. Bab II Gambaran Umum, memuat Kinerja dan Capaian Implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, dan Isu Strategis dan Peluang Perbaikan untuk Akselerasi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029;
3. Bab III Program dan Kegiatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029, memuat rincian program dan kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi; dan
4. Bab IV Penutup, memuat rangkuman Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Untuk mengukur progres implementasi Rencana Aksi SDI periode sebelumnya, dilakukan pemantauan secara periodik terhadap capaian program yang telah diamanatkan. Bab ini menyajikan analisis komprehensif atas kinerja dan capaian strategis Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022–2024 sebagai landasan faktual dalam menyusun strategi akselerasi periode 2025–2029.

A. Kinerja dan Capaian Implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022–2024

Berdasarkan pemantauan, kinerja Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada tahun 2022–2024 menunjukkan progres yang substansial dan terukur, serta berhasil mentransformasi SDI dari inisiatif kebijakan menjadi fondasi operasional tata kelola data. Capaian ini dikelompokkan berdasarkan dimensi strategis pada Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada tahun 2022–2024 diantaranya:

1. Penguatan Tata Kelola
 - a. Telah diterbitkannya berbagai Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai panduan operasional seperti Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara SDI dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal SDI, serta adopsi standar internasional *Data Management Body of Knowledge* (DAMA-DMBOK) menunjukkan komitmen penguatan manajemen data setara praktik terbaik global;
 - b. Telah ditetapkan berbagai pedoman teknis operasional, seperti Kode Referensi Indikator Pembangunan dan Mekanisme Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia; serta
 - c. Komitmen kelembagaan SDI menunjukkan hasil baik di tingkat daerah, ditunjukkan oleh 87% Provinsi (33 dari 38) dan 72% Kabupaten/Kota (371 dari 514) telah menetapkan peraturan kelembagaan SDI.
2. Keterhubungan Teknis dan Konsolidasi Data Nasional
 - a. Keterhubungan Instansi Pusat dan Daerah dengan Portal SDI telah mencapai tingkat yang memadai (72% K/L, 81% Provinsi, dan 53% Kab/Kota terhubung);
 - b. Jumlah dataset yang tersedia dalam Portal SDI terus meningkat secara eksponensial dari 195.015 dataset (2022) hingga mencapai lebih dari 465.980 dataset;
 - c. Integrasi Ina-Geoportal (Satu Peta) dengan Portal SDI, menjadikan data geospasial sebagai instrumen strategis dalam perencanaan; serta
 - d. Partisipasi tinggi dalam evaluasi SDI tahun 2024 (76 K/L, 25 Provinsi, dan 269 Kab/Kota). Indeks SDI sebagai indikator utama dalam penilaian Reformasi Birokrasi dan RPJMN.

3. Dukungan Data untuk Agenda Pembangunan Nasional
 - a. Jumlah data prioritas nasional mengalami peningkatan signifikan dari 693 data (2022) menjadi 1.879 data (2024);
 - b. *Workshop* Gotong Royong Data (WGRD) dengan partisipasi 100% K/L, telah berhasil mengidentifikasi 2.950 data prioritas yang ditetapkan sebagai Data Prioritas Jangka Menengah 2025-2029; serta
 - c. Pemanfaatan data prioritas yang diwujudkan melalui pengembangan *dashboard* tematik yang relevan dengan isu strategis, seperti *Dashboard* SDGs dan *Dashboard* Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemantauan program prioritas presiden.

B. Isu Strategis dan Peluang Perbaikan untuk Akselerasi Satu Data Indonesia Tahun 2025–2029

Meskipun fondasi SDI telah lebih kokoh, implementasi pada tahun 2025-2029 menghadapi isu strategis yang perlu dimitigasi untuk mencapai percepatan implementasi SDI. Tantangan ini sekaligus menciptakan peluang perbaikan untuk akselerasi yang akan dioptimalkan melalui rencana aksi ini demi mendukung agenda pembangunan periode 2024-2029.

1. Isu Strategis

Berdasarkan pemantauan implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada tahun 2022-2024, terdapat tantangan struktural dan kesenjangan kinerja yang harus diatasi secara agresif dalam Rencana Aksi 2025-2029 antara lain:

- a. Kesenjangan pemahaman, kapasitas, dan kewenangan formal Walidata di tingkat daerah menyebabkan pelaksanaan SDI tidak merata secara nasional. Selain itu, kondisi bahwa hanya 41% Kementerian/Lembaga yang telah memiliki peraturan kelembagaan internal SDI menunjukkan adanya diskoneksi antara kemajuan integrasi teknis dengan kesiapan regulatif yang menjadi prasyarat keberlanjutan;
- b. Pemenuhan prinsip SDI (Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk, dan Interoperabilitas) belum seluruhnya terinternalisasi dalam proses bisnis harian. Hal ini berimplikasi langsung pada inkonsistensi kualitas data di Portal SDI dan menghambat pemanfaatan data yang paripurna;
- c. Interoperabilitas sistem masih bersifat parsial dan belum mencapai integrasi *seamless* antar-instansi. Infrastruktur pendukung *Big Data* Pemerintah belum optimal dikembangkan dan peningkatan risiko serius terkait *cybersecurity* akibat masifnya integrasi data nasional yang memerlukan investasi dan standar pengamanan yang ketat; serta
- d. Kesenjangan kompetensi teknis dan manajerial pengelola data, serta kapasitas literasi data yang belum memadai pada level strategis. Secara kolektif, kondisi ini menuntut intervensi kebijakan yang terstruktur melalui program pengembangan SDM untuk menjamin keberhasilan adopsi *data-driven policy*.

2. Peluang Perbaikan untuk Akselerasi

Berbagai isu strategis yang teridentifikasi merupakan peluang nyata untuk mengakselerasi dan mengoptimalkan solusi SDI dimana hal ini akan diakomodir dalam Rencana Aksi 2025-2029 yang sejalan dengan visi transformasi digital nasional. Adapun peluang perbaikan untuk akselerasi yang dapat didorong melalui implementasi SDI antara lain:

- a. Implementasi SDI memiliki peluang dalam mendukung langsung agenda prioritas pemerintahan yang tertuang dalam RPJMN, PHTC, PSN, program direktif Presiden, program prioritas daerah, dan program lainnya. Rencana Aksi ini akan memprioritaskan Data PHTC dan program direktif Presiden sebagai target interoperabilitas maksimal dan satu sumber kebenaran data (*Single Source of Truth*), sehingga secara langsung memberikan dampak nyata dan terukur bagi keberhasilan program pemerintah;
- b. Pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan *big data* sebagai kunci lompatan kualitas pelayanan pemerintah. Pemanfaatan ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas analisis prediktif, *data-driven policy*, dan *data-driven service* yang proaktif kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi secara eksponensial; serta
- c. Penguatan keberlanjutan merupakan penjamin implementasi SDI dalam jangka panjang. Fokus utama diarahkan pada pembentukan budaya *data-driven* yang kokoh serta kepastian pendanaan jangka panjang bagi SDM dan teknologi, sehingga SDI secara fundamental bertransformasi menjadi aset strategis nasional yang terintegrasi dan adaptif.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
TAHUN 2025-2029

A. Rincian Program dan Kegiatan

Memasuki implementasi, Bab ini akan menjabarkan secara rinci Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan perwujudan konkret dari strategi akselerasi SDI yang disusun untuk merespon isu strategis dan memanfaatkan peluang yang telah teridentifikasi pada Bab II. Seluruh intervensi dibagi dalam 8 program utama yang diturunkan menjadi 34 kegiatan dan 89 sub-kegiatan. Berikut merupakan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disajikan secara komprehensif dalam bentuk tabel berikut:

Tabel Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	<i>Output</i>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	1.1 Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia	1.1.1 Melakukan Reviu Regulasi Satu Data Indonesia Sesuai Perkembangan Teknologi dan Kondisi Terkini	Dokumen Kajian kebijakan Satu Data Indonesia		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, BSSN, Kemenkomdigi
		1.1.2 Penyelarasan <i>Framework</i> Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Data Nasional	Dokumen <i>framework</i> dan sistem monitoring-evaluasi penyelenggaraan data nasional		1 Dokumen	1 Dokumen			Kementerian PPN/Bappenas,	BPS, BIG, Kementerian PANRB, Kemenkomdigi

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		1.1.3 Penyusunan Surat Edaran 3 Menteri tentang Efisiensi Belanja SPBE KL dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025	Surat Edaran 3 Menteri	1 Dokumen					Kementerian PPN/Bappenas	Kemenkomdigi, Kementerian PANRB
		1.1.4 Melakukan Penguatan Kelembagaan Satu Data Instansi Pusat	K/L melakukan harmonisasi/penyelarasan regulasi Satu Data	50% K/L	70% K/L	80% K/L	90% K/L	100% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		1.1.5 Melakukan Penguatan Kelembagaan Satu Data Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah melakukan harmonisasi/penyelarasan regulasi Satu Data	80% Prov 75% Kab/Kota	85% Prov 80% Kab/Kota	90% Prov 85% Kab/Kota	95% Prov 90% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
	1.2 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	1.2.1 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	1 Dokumen					Kementerian PPN/Bappenas	
		1.2.2 Penyusunan Pedoman Manajemen Data	2 Dokumen Pedoman Manajemen Data	1 Dokumen		1 Dokumen			Kementerian PPN/Bappenas	

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		1.2.3 Penyusunan Pedoman Monitoring & Evaluasi (Indeks SDI)	Dokumen Pedoman Monitoring & Evaluasi (Indeks SDI)	1 Dokumen					Kementerian PPN/Bappenas	
	1.3 Penyelarasan dengan Pemerintah Digital	1.3.1 Penyusunan Pedoman Arsitektur data dan Informasi Tingkat K/L/D	Dokumen Pedoman arsitektur data dan informasi tingkat K/L/D		1 Dokumen		1 Dokumen		Kementerian PANRB	Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkomdigi
	1.4 Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pelatihan/Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	1.4.1 Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pelatihan/Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan SDI	5 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	8 Kegiatan	5 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, Kemendagri*
2. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	2.1 Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Induk Satu Data Indonesia	2.1.1 Menyusun Kajian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk Non Pemerintah	Dokumen kajian penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk non Pemerintah			1 Dokumen			Kementerian PPN/Bappenas	Kemenkomdigi
	2.2 Perencanaan Data: Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	2.2.1 Menyusun Pedoman Rencana Aksi Satu Data Indonesia untuk K/L/D	Dokumen Pedoman Rencana Aksi Satu Data Indonesia K/L/D		1 Dokumen				Kementerian PPN/Bappenas	

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2.2.2 Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat K/L	K/L telah memiliki dokumen rencana aksi Satu Data Indonesia		70% K/L	80% K/L	90% K/L	100% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		2.2.3 Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen rencana aksi Satu Data Indonesia		85% Prov 80% Kab/Kota	90% Prov 85% Kab/Kota	95% Prov 90% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
		2.2.4 Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029	Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029	1 Dokumen					Kementerian PPN/Bappenas	
	2.3 Penyusunan Tata Kelola Perencanaan Data	2.3.1 Penyusunan POS Perencanaan Data Tingkat K/L/D	K/L/D telah memiliki POS Perencanaan Data		70% K/L 85% Prov 80% Kab/Kota	80% K/L 90% Prov 85% Kab/Kota	90% K/L 95% Prov 90% Kab/Kota	100% K/L 100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	
		2.3.2 Penyusunan POS Pengusulan Data Prioritas Tingkat K/L	K/L/D telah memiliki POS Pengusulan Data Prioritas		70% K/L	80% K/L	90% K/L	100% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		2.3.3 Penyusunan Pedoman Kebijakan Perencanaan dan	Dokumen Pedoman Kebijakan			1 Dokumen			Kementerian	Kemenkeu, Kemenkomdigi, Kementerian

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Penganggaran Satu Data Instansi Pusat dan Daerah	Perencanaan dan Penganggaran Satu Data Instansi Pusat dan Daerah						PPN/Bappenas	PANRB, Kemendagri*
	2.4 Penyelarasan dengan Pemerintah Digital	2.4.1 Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi di Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah telah memiliki arsitektur data dan informasi yang telah diinput dalam Sistem Informasi Arsitektur (Kementerian PAN-RB)		85% Prov 45% Kab/Kota	90% Prov 60% Kab/Kota	95% Prov 75% Kab/Kota	100% Prov 80% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PANRB, Kemendagri*, Kemenkomdigi
		2.4.2 Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi di Tingkat K/L	K/L telah memiliki arsitektur data dan informasi yang telah diinput dalam Sistem Informasi Arsitektur (Kementerian PAN-RB)			80% K/L	90% K/L	100% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PANRB, Kemenkomdigi
	2.5 Perencanaan Daftar Data Prioritas	2.5.1 Penetapan Data Prioritas Satu Data Indonesia berdasarkan RKP, RPJPN, RPJMN, SDGs,	Dokumen penetapan Data Prioritas Satu Data Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		dan Kebutuhan Mendesak (Program Direktif Presiden)								
		2.52 Monitoring Perencanaan/ Penyediaan Data Pembangunan untuk Mendukung PHTC/PSN	Terselenggaranya kegiatan monitoring perencanaan/ penyediaan data pembangunan untuk mendukung PHTC/PSN		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
	2.6 Perencanaan Daftar Data Daerah	2.6.1 Penyusunan Pedoman Penyelarasn Daftar Data Daerah dengan Daftar Data Pusat	Terlaksananya koordinasi dengan Kemendagri untuk melaksanakan konsolidasi penyusunan daftar data daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
		2.6.2 Sosialisasi Daftar Kebutuhan Data Pembangunan Daerah dari Instansi Pusat	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi daftar kebutuhan data pembangunan daerah dari instansi pusat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemendagri*	Kementerian PPN/Bappenas

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2.6.3 Penyusunan Daftar Data Statistik dan Geospasial Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen daftar Data Statistik dan Spasial		85% Prov 80% Kab/Kota	90% Prov 85% Kab/Kota	95% Prov 90% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, Kemendagri*
		2.6.4 Penyusunan Rancangan Awal Kebutuhan Data Statistik Daerah Berdasarkan Hasil Identifikasi Instansi Pusat dan Indikator Pembangunan Daerah.	Dokumen rancangan awal kebutuhan data daerah berdasarkan identifikasi instansi pusat dan indikator outcome pembangunan daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
		2.6.5 Penyusunan Rancangan Awal Kebutuhan Data Geospasial Daerah Berdasarkan Hasil Identifikasi Instansi Pusat dan Indikator Outcome Pembangunan Daerah	Penyusunan rancangan awal kebutuhan data geospasial daerah berdasarkan hasil identifikasi instansi pusat dan indikator pembangunan daerah.		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
		2.6.6 Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan	Terselenggaranya kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian an	Kemendagri*

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Penyediaan Data Pembangunan Pusat-Daerah	Monitoring dan evaluasi keterpaduan penyediaan data pembangunan pusat-daerah						PPN/Bappenas	
	2.7 Penyusunan dan Pengumpulan Daftar Data Tingkat K/L	2.7.1 Penyusunan Daftar Data Statistik Tingkat K/L	K/L telah memiliki dokumen daftar Data Statistik		50% K/L	70% K/L	90% K/L	100% K/L	BPS	Kementerian PPN/Bappenas
		2.7.2 Penyusunan Daftar Data Geospasial Tingkat K/L	K/L telah memiliki dokumen daftar Data Geospasial		50% K/L	70% K/L	90% K/L	100% K/L	BIG	Kementerian PPN/Bappenas
		2.7.3 Penyusunan Daftar Data Prioritas yang Mendukung Keterpaduan Layanan Pemerintah Digital Tingkat K/L	K/L telah memiliki dokumen daftar data yang mendukung keterpaduan layanan pemerintah digital				10% K/L	25% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		2.7.4 Pengumpulan Data Statistik Prioritas Tingkat K/L yang Memenuhi Standar Data dan Memuat Metadata	K/L telah mengumpulkan Data Statistik Prioritas sesuai			50% K/L	70% K/L	90% K/L	BPS	Kementerian PPN/Bappenas

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	<i>Output</i>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Standar Data dan Metadata							
		2.7.5 Pengumpulan Data Spasial Prioritas Tingkat K/L yang Memenuhi Standar Data dan Metadata	K/L telah mengumpulkan daftar Data Spasial Prioritas sesuai Standar Data dan Metadata			50% K/L	70% K/L	90% K/L	BIG	Kementerian PPN/Bappenas
	2.8 Penyusunan dan Pengumpulan Daftar Data Daerah	2.8.1 Penyusunan Daftar Data yang Mendukung Keterpaduan Layanan Pemerintah Digital Tingkat Daerah	Daerah telah memiliki dokumen daftar data yang mendukung keterpaduan layanan pemerintah digital					10 Prov 20 Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	
	2.9 Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Data	2.9.1 Penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk pada Data Prioritas Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia di Tingkat K/L	Data Prioritas K/L yang telah menggunakan kode referensi dan Data Induk			50% K/L	70% K/L	90% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		2.9.2 Pengembangan <i>Dashboard</i> Monitoring Kualitas Data	Tersedianya <i>dashboard</i> monitoring kualitas data		1 <i>Dashboar</i> d telah tersedia	1 <i>Dashboar</i> d telah tersedia	1 <i>Dashboar</i> d telah tersedia	1 <i>Dashboar</i> d telah tersedia	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, Kemenkeu

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2.9.3 Peningkatan Kualitas Data Tingkat K/L/D	K/L/Pemerintah Daerah telah melakukan pemeriksaan kualitas data			80% K/L 90% Prov 80% Kab/Kota	90% K/L 95% Prov 90% Kab/Kota	100% K/L 100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG
	2.10 Penyusunan Pedoman Penyebarluasan Data	2.10.1 Penyusunan Pedoman Pertukaran Data: a. Internal Instansi Pemerintah b. Instansi Pemerintah - Badan Hukum Publik c. Instansi Pemerintah - Swasta	Dokumen Pedoman Pertukaran Data		1 dokumen	1 dokumen			Kementerian PPN/Bappenas	Kemenkomdigi, BSSN
	2.11 Pelaksanaan Penyebarluasan data	2.11.1 Penyusunan Pedoman Standardisasi Penyebarluasan Data	Dokumen standarisasi penyebarluasan data		1 dokumen				Kementerian PPN/Bappenas	
		2.11.2 Pengembangan Interoperabilitas Data untuk Keterpaduan Layanan Pemerintah Digital pada K/L/D	Keterpaduan Layanan yang disediakan oleh K/L/D		2 Layanan	10 Layanan	20 Layanan	30 Layanan	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PANRB, Kemenkomdigi, BSSN, Kemendagri*
		2.11.3 Penyebarluasan Data Prioritas K/L yang Telah Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia pada Portal Satu Data Indonesia	Data prioritas yang tersedia untuk disebarluaskan melalui Portal		21%	80%	90%	100%	Kementerian PPN/Bappenas	BIG, BPS

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Data Satu Data Indonesia							
		2.11.4 Penyusunan dan Penyebarluasan Laporan <i>Civil Registration and Vital Statistics</i> (CRVS)	Tersusunnya laporan <i>Civil Registration and Vital Statistics</i> (CRVS)		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kemendagri*	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kemenkes
		2.11.5 Integrasi Portal Kebijakan Satu Peta dengan Portal Satu Data Indonesia	Terlaksananya Integrasi portal Satu Data Indonesia dengan Portal Satu Peta					1 Kegiatan	BIG	BIG, Kementerian PPN/Bappenas
		2.11.6 Penyebarluasan Data Daerah yang Telah Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia pada Portal Data daerah	K/L/D telah melakukan penyebarluasan data melalui Portal Data K/L/D		70% K/L 70% Prov 50% Kab/Kota	70% K/L 80% Prov 70% Kab/Kota	80% K/L 90% Prov 80% Kab/Kota	90% K/L 95% Prov 90% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, Kemenkomdigi, BSSN, Kemendagri*
	2.12 Interoperabilitas Data untuk Perencanaan Pembangunan	2.12.1 Integrasi dan Pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM secara Terpadu untuk Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Integrasi dan pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM secara terpadu untuk perencanaan pembangunan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	Kemeninveshil/BKPM, Kementerian UMKM

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	2.13 Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan	2.13.1 Melakukan Perluasan Pemanfaatan DTSEN untuk Keperluan Perencanaan Pembangunan	Kegiatan hasil pemanfaatan DTSEN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PANRB, Kemenkomdigi, BPS, BSSN, Kemendagri*
		2.13.2 Pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan di tingkat K/L	K/L memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan		25% K/L	50% K/L	70% K/L	100% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*, BSSN
		2.13.3 Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan di Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan		15% Prov 10% Kab/Kota	40% Prov 35% Kab/Kota	55% Prov 50% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	BSSN, Kemendagri*
		2.13.4 Penguatan Implementasi SEPAKAT di Daerah	Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian PPN/Bappenas	

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		2.13.5 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan SEPAKAT bagi Pemerintah Daerah	Persentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas perencanaan berbasis bukti melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	10%	20%	30%	40%	50%	Kementerian PPN/Bappenas	
		2.13.6 Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Terlaksananya implementasi Identitas kependudukan digital (IKD)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PANRB, Kemendagri*
3. Peningkatan Kepatuhan Prinsip SDI	3.1 Penyusunan Tata Kelola Kode Referensi dan Data Induk	3.1.1 Penyusunan Pedoman/POS Kode Referensi dan/atau Data Induk	Dokumen Kode Pedoman Kode Referensi dan/atau Data Induk		1 Dokumen				Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG
	3.2 Penetapan Kode Referensi dan Data Induk Sektoral	3.2.1 Penetapan Kode Referensi dan Data Induk Tingkat K/L	Dokumen/tabel Penetapan Kode Referensi dan Data Induk tingkat K/L	1 katalog kodref / data induk	1 katalog kodref/ data induk	1 katalog kodref/ data induk	1 katalog kodref/ data induk	1 katalog kodref/ data induk	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	3.3 Pengembangan dan Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk	3.3.1 Pemanfaatan Hasil Implementasi Kode Referensi Indikator Pembangunan pada Dokumen Perencanaan K/L untuk Menyusun Daftar Data/Data Prioritas Instansi Pusat	Jumlah K/L yang telah memanfaatkan Kode Referensi Indikator Pembangunan dalam menyusun daftar data/data prioritas		50% K/L	70% K/L	90% K/L	100% K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		3.3.2 Pemanfaatan Hasil Implementasi Kode Referensi Indikator Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Daerah untuk Menyusun Daftar Data	Jumlah Pemda yang telah memanfaatkan Kode Referensi Indikator Pembangunan dalam menyusun daftar data					10 Prov 20 Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	Kemendagri*
	3.4 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	3.4.1 Pendampingan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Kegiatan pendampingan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, Kemenkeu
4. Optimalisasi Sistem Katalog Data Nasional	4.1 Penyusunan Tata Kelola Sistem Katalog Data Nasional	4.1.1 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Katalog Data Nasional	Dokumen Pedoman Pengelolaan Katalog Data		1 Dokumen				Kementerian PPN/Bappenas	
	4.2 Pengembangan Sistem Katalog Data Nasional	4.2.1 Membangun Sistem Katalog Data Nasional	Tersedianya Sistem Katalog Data Nasional		SKDN berbasis	Pengembangan 1 fitur	Pengembangan 1 fitur	Pengembangan 1 fitur	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, BSSN, Kemenkomdigi

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			berbasis API terbuka		API telah tersedia	SKDN telah tersedia	SKDN telah tersedia	SKDN telah tersedia	PPN/Bappenas	
	4.3 Penyusunan Katalog Data Nasional Tematik	4.3.1 Penyusunan Katalog Data Nasional	Tersedianya Katalog Data Nasional		Katalog Data Nasional: 1 tematik	Katalog Data Nasional: 1 tematik	Katalog Data Nasional: 1 tematik	Katalog Data Nasional: 1 tematik	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG
5. Optimalisasi dan Pengembangan Portal Data	5.1 Pengembangan <i>Dashboard</i> data	5.1.1 Pengembangan <i>Dashboard</i> Indikator Pembangunan pada Portal Data Satu Data Indonesia	Tersedianya <i>dashboard</i> data Indikator Pembangunan pada portal data Satu Data Indonesia		Tersedianya <i>dashboard</i> data Indikator Pembangunan	Pengembangan 1 fitur pada <i>dashboard</i> data Indikator Pembangunan	Pengembangan 1 fitur pada <i>dashboard</i> data Indikator Pembangunan	Pengembangan 1 fitur pada <i>dashboard</i> data Indikator Pembangunan	Kementerian PPN/Bappenas	
		5.1.2 Pengembangan <i>Dashboard</i> Indikator Pembangunan pada Portal Data K/L/D	Tersedianya <i>dashboard</i> data Indikator Pembangunan pada portal data K/L/D			5 K/L 2 Provinsi 5 Kab/Kota	15 K/L 10 Provinsi 20 Kab/Kota	25 K/L 20 Provinsi 35 Kab/Kota	Kementerian PPN/Bappenas	
		5.1.3 Pengembangan <i>Dashboard</i> Khusus Pimpinan Tinggi Negara	Tersedianya <i>Dashboard</i> Khusus Pimpinan Tinggi Negara		1 <i>Dashboar d</i> Khusus Pimpinan Tinggi Negara telah tersedia	1 <i>Dashboar d</i> Khusus Pimpinan Tinggi Negara telah tersedia	1 <i>Dashboar d</i> Khusus Pimpinan Tinggi Negara telah tersedia	1 <i>Dashboar d</i> Khusus Pimpinan Tinggi Negara telah tersedia	Kementerian PPN/Bappenas	Kemenkomdigi, Kementerian PANRB

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	5.2 Pengembangan Portal Satu Data Indonesia	5.2.1 Pengembangan Modul Aplikasi Perencanaan Satu Data Indonesia	Tersedianya modul perencanaan SDI pada Portal Satu Data Indonesia		Modul aplikasi perencanaan v1	Modul aplikasi perencanaan v2	Modul perencanaan telah tersedia	Modul perencanaan telah tersedia	Kementerian PPN/Bappenas	
		5.2.2 Pengembangan Fitur Komunitas Ahli Data dalam Portal Satu Data Indonesia	Tersedianya fitur Komunitas Ahli Data dalam Portal Satu Data Indonesia					Fitur Komunitas Ahli Data telah tersedia	Kementerian PPN/Bappenas	
		5.2.3 Pengembangan Fitur Request Data oleh Publik/non Pemerintah pada Portal Satu Data Indonesia	Tersedianya fitur request data oleh publik/non pemerintah			Fitur tersedia	Fitur tersedia	Fitur tersedia	Kementerian PPN/Bappenas	
		5.2.4 Pengembangan Modul DTSEN pada Portal SDI	Tersedianya modul DTSEN pada Portal Satu Data Indonesia			modul DTSEN telah tersedia	modul DTSEN telah tersedia	modul DTSEN telah tersedia	Kementerian PPN/Bappenas	BSSN
	5.3 Pelaksanaan Integrasi Portal Satu Data Indonesia	5.3.1 Pelaksanaan Integrasi Kode Referensi Indikator	Jumlah Aplikasi yang telah terintegrasi		1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Kementerian PPN/Bappenas	
6. Pengembangan Teknologi Terkini	6.1 Penyusunan Regulasi untuk Mendukung Implementasi Teknologi Terkini	6.1.1 Perumusan Pedoman Etika, Privasi, dan Tata Kelola Data untuk AI di Instansi Pemerintah	Dokumen Pedoman etika, privasi, dan tata kelola data untuk AI di			1 Dokumen			Kementerian PPN/Bappenas	BSSN, Kemenkomdigi

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia			Pemerintahan telah ditetapkan							
		6.1.2 Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Big Data Pemerintah: Pedoman Etika, Privasi, dan Tata kelola Data untuk Big Data di Instansi Pemerintah	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Big Data Pemerintah telah ditetapkan				1 Dokumen		Kementerian PPN/Bappenas	BSSN, Kemenkomdigi
	6.2 Penyiapan Infrastruktur Teknologi Terkini	6.2.1 Menyusun Kajian/Rekomendasi Strategis Infrastruktur Data untuk Mendukung AI dan Big Data	Dokumen Kajian kesiapan infrastruktur data untuk mendukung AI		1 dokumen				Kemenkomdigi	Kementerian PPN/Bappenas
		6.2.2 Penyiapan Ekosistem Infrastruktur Data Nasional untuk Mendukung AI dan Big Data	Tersedianya Ekosistem Infrastruktur data Nasional untuk mendukung AI					1 Ekosistem Infrastruktur Data Nasional	Kemenkomdigi	
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara dan Penguatan	7.1 Penyusunan Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Satu Data Indonesia	7.1.1 Penyusunan Standar Kompetensi ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah	Dokumen Kebijakan Standar Kompetensi ASN Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah		1 Dokumen				Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian PANRB, Kemendagri*

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	<i>Output</i>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Literasi Satu Data Indonesia		7.1.2 Penyusunan kurikulum pengembangan kompetensi ASN sebagai SDM Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Dokumen kurikulum pengembangan kompetensi SDM (termasuk bahan ajar dan panduan program pelatihan)		2 Dokumen				Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, Kementerian PANRB, BKN, LAN
		7.1.3 Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Standar Kompetensi dan Pemetaan Kebutuhan SDM ASN Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan Daerah	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi dan pemetaan kebutuhan SDM ASN Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PANRB	Kemendagri*, Kementerian PPN/Bappenas, BIG
	7.2 Pengembangan Kompetensi dan Talent Pool SDM Satu Data Indonesia	7.2.1 Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan SDM Data (Statistik dan Geospasial) di Setiap K/L	K/L telah melakukan pemetaan kompetensi dan kebutuhan SDM Data (Statistik dan Geospasial)		40% K/L	60% K/L	80% K/L	100% K/L	Kementerian PANRB	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		7.2.2 Pemetaan Kompetensi dan Kebutuhan SDM Data (Statistik dan Geospasial) di Setiap Daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan pemetaan kompetensi dan kebutuhan SDM Data (Statistik dan Geospasial)		30% Prov 25% Kab/Kota	50% Prov 45% Kab/Kota	75% Prov 60% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PANRB	Kemendagri*, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG
		7.2.3 Pemenuhan Kebutuhan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat K/L	K/L telah melakukan pemenuhan kebutuhan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia		30% K/L	50% K/L	70% K/L	100% K/L	Kementerian PANRB	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG
		7.2.4 Pemenuhan Kebutuhan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan pemenuhan kebutuhan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia		20% Prov 15% Kab/Kota	40% Prov 35% Kab/Kota	55% Prov 50% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PANRB	Kemendagri*, Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG
		7.2.5 Peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia di K/L	K/L yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM penyelenggara		30% K/L	50% K/L	70% K/L	100% K/L	Kementerian PANRB	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG, LAN, BKN

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Output	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			Satu Data Indonesia							
		7.2.6 Peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia di Pemda	Pemda yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia		20% Prov 15% Kab/Kota	40% Prov 35% Kab/Kota	55% Prov 50% Kab/Kota	100% Prov 100% Kab/Kota	Kementerian PANRB	Kemendagri*, Kementerian PPN/Bappenas
8. Penguatan Keberlanjutan Satu Data Indonesia	8.1 Penyelenggaraan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia	8.1.1 Pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia	Kegiatan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	
	8.2 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	8.2.1 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat pusat (termasuk pembina)	Kegiatan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, BIG, BSSN, Kemenkeu, Kemenkomdigi
		8.2.2 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia di internal K/L	K/L telah menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia	1 Kegiatan untuk setiap K/L	1 Kegiatan untuk setiap K/L	1 Kegiatan untuk setiap K/L	1 Kegiatan untuk setiap K/L	1 Kegiatan untuk setiap K/L	Kementerian PPN/Bappenas	
		8.2.3 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Provinsi telah menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia	1 Kegiatan untuk setiap	1 Kegiatan untuk setiap Provinsi	1 Kegiatan untuk setiap Provinsi	1 Kegiatan untuk setiap Provinsi	1 Kegiatan untuk setiap Provinsi	Kementerian PPN/Bappenas	

[illegible]

Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan	<i>Output</i>	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Penanggu ng Jawab	Instansi Pendukung
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029	Satu Data Indonesia 2025- 2029						PPN/Bapp enas	

* termasuk pelibatan Pemerintah Daerah

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi SDI Tahun 2025-2029 merupakan fungsi esensial untuk menjamin akuntabilitas kinerja dan mengukur efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target program, kegiatan, dan sub-kegiatan Rencana Aksi SDI Tahun 2025–2029 dilakukan paling sedikit satu tahun sekali. Pemantauan dilakukan secara teknis oleh Kelompok Kerja Forum SDI tingkat Pusat dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Pengarah SDI. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan mengukur pencapaian target dan perbaikan implementasi Renaksi SDI tiap tahunnya.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen ini merupakan pedoman resmi bagi seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Tahun 2025-2029. Keberhasilan implementasi Rencana Aksi ini menjadi prasyarat kunci bagi tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



Ari Prasetyo